

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja aparat Pemerintah Desa Moahudu dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparatur, adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta selalu melakukan lobi-lobi terhadap pemerintah daerah dan kerja sama dengan pihak pemerintah dari daerah Kabupaten untuk membuka wawasan bagi para aparat pemerintah desa dengan mengeluarkan izin studi yang dibiayai oleh daerah kabupaten tetapi tidak secara penuh hanya sebagian saja untuk tugas belajar sistem paket dari jenjang SD/ sederajat ke jenjang SMP dan dari jenjang SMP/ sederajat ke jenjang SMU, Kemudian mengikut sertakan para aparat Pemerintah Desa Moahudu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang dilakukan di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten Gorontalo yang bertujuan memberikan kedudukan organisasi dalam peran instansi masing-masing dan pemerintah desa harus mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari secara efektif dan efisien serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah Desa Moahudu dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang tertentu.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Aparat Desa Moahudu dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu:

- 1) Pendidikan atau Sumber Daya aparatur pemerintah Desa Moahudu rendah dimana aparat Desa Moahudu hanya berpendidikan rata-rata SD dan SMP.
- 2) Kedisiplinan aparat pemerintah Desa Moahudu dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan dengan optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab aparatnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pelayanan masyarakat.
- 3) Pendapatan Aparat pemerintah Desa Moahudu masih sangat rendah disebabkan karena aparatnya rata-rata berpendidikan rendah bukan PNS selain Sekretaris Desa sehingga aparatnya acuh tak acuh dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya masih kurang disamping itu pengadaan sarana dan prasarana penunjang di Kantor Desa Moahudu belum memadai bahkan hamper tidak ada.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Desa Moahudu dalam pelaksanaan Pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan secara efektif dan professional

2. Meminta pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten agar pemenuhan kebutuhan dengan cara pemberian gaji (honor) yang layak bagi aparat Pemerintah Desa Moahudu agar senantiasa diperhatikan.
3. Perlunya seorang pemimpin beserta aparatnya yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta ditunjang dengan kemampuan atau keterampilan managerial agar pelaksanaan kinerja ataupun pelaksanaan Pembangunan di Desa Moahudu dapat tercipta dengan baik.
4. Untuk menunjang kerja aparatur pemerintah Desa Moahudu maka perlu adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga memberikan sumbangsih bagi kemantapan terciptanya kualitas kerja efektif dan efisien dalam melayani masyarakat

Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengawasi jalannya setiap pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa khususnya di Desa Moahudu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharni, 2013. *Prosedur Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hazairin.2014. *Pemerintah Desa dan Pokok-pokok Pemerintah Desa*. Jakarta: Swadaya
- Kurniawan, Agung 2014. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mahsun, Mohamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPTE
- Maleong.J Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (terjemahsan oleh Tjun surjaman)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- N Beratha, 1992. *Mayarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndaraha, Taliziduhu 2013. *Organisasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rozaki, Abdur 2014. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi*. Yogyakarta: IRE Press
- Sudermayanti ,2016. *Good Governmance dalam Rangka Otomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju
- Suprpto Ch. 20015. *Kualitas Kinerja dalam Pemerintah Desa*. Jakarta: Cempaka Putih
- Surianingrat, Bayu. 2015. *Pemerintah Administrasi Desa Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru
- Surwowono, 2017 *Konsep Pembrrdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Strong C.F 2015 *Kewenangan Eksekutif*, diperbanyak oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Widjaja, HAW. 2016. *Pemerintah Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2016. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<http://www.ac.id/pemerintahan/content/uploads/2010/01/> Jakarta: Bumi

Aksara